BANDUNG BEDAS!

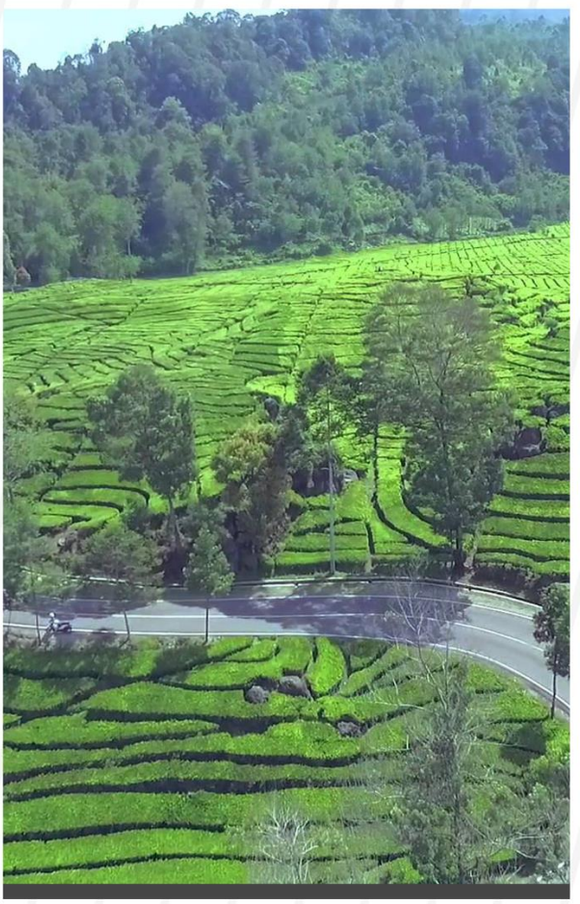
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR ..... TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023







REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 156 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 2

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. latar belakang dan Dasar Hukum;
b. hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

(1) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun

2021-2026 yang akan digunakan untuk melaksanakan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

(2) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

(2) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup tentang Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi;

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Perangkat Daerah dengan DPRD; dan
d. perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

Pasal 7

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun berjalan.

Pasal 8

Rincian dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan evaluasi hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan pada saat penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

BAB V
PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 10

(1) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diubah apabila :
    a. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKP;
    b. Terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
    c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
a. pagu anggaran program;
b. kegiatan dan sub kegiatan;
c. perubahan target indikator kinerja program;
d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR



Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Selain itu, Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana lainnya antara lain gempa bumi, gerakan tanah, longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan wabah penyakit lain seiring terjadinga bencana.

Penanganan penanggulangan bencana terdapat pada bebrerapa tahapan diantaranya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan pada saat kejadian dan penanganan penanggulangan pada paska bencana, hal ini sudah menjadi bagian dari pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Berkenaan tugas dan fungsi tersebut selain dari apek penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari aspek perencanaan. BPBD dalam penyusunan perencanan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan OPD, tahap penyusunan renja OPD, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2023 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023.

Semoga melalui Rencana Kerja ini, diharapkan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang membutuhkannya.

Soreang, 29 Juli 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19670914 199501 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR……...…….. i

DAFTAR ISI……...……. iii

BAB I PENDAHULUAN……...…. I-1

1.1 Latar Belakang……..... I-1

1.2 Landasan Hukum……..…… I-2

1.3 Maksud dan Tujuan……..……. I-5

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja……..……. I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021 II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 2021……. II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja PD……..... II-18

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi……... II-20

2.4 Review terhadap RKPD……. II-26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan……...….. II-46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……..… III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……..... III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD .....……..... III-2

3.3 Program dan Kegiatan……..……. III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD……..……...…. IV-1

BAB V PENUTUP……... V-1

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Renja ini, BPBD melakukan pemetaan dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifkasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan focus dan arah gerak

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-3 (Ketiga) yaitu **"3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan".**

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
16. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
17. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
19. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2023 serta terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanganan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Bandung

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bancana Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2023;

3. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman / arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Renja PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu



Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target dan capaian realisasinya. Hasil sebagaimana tersebut diatas, dapat kami sampaikan dan jelaskan berdasarkan indikator kegiatan yang terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Rata-rata Respontime penanganan Penanggulangan	100%	100	100
2	Meningkatnya sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana	Persentase Meningkatnya sarana prasarana penunjang penanggulangan	100%	73,34	73,34
3	Meningkatknya mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang telah	100%	100	100
		Jumlah SDM aparatur dan masyarakat yang terlatih di bidang kebencaanaan	1325 Orang	1984	149.73
4	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	74 Nilai	71.65	96.82
		Persentase BMD dalam kondisi Baik	100%	89.61	89.61

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

1. Evaluasi Program Tahun 2021

Pada tahun 2021 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 26.108.043.335,96 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Koma Sembilan Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 22.362.147.688,00,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam

Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau pencapaian 85.65%, untuk mencapai hasil kinerja telah dilaksanakan melalui capaian 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan rincian belanja sebagai berikut :

a) Belanja Operasi sebesar Rp. 25.150.653.635,96 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 21.564.255.318 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas) atau pencapaian 85.74%;
b) Belanja Modal sebesar Rp 957.389.700 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus) dengan realisasi sebesar Rp 797.892.370,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh) atau pencapaian 83.34%. Dijabarkan melalui 2 Program 6 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2021

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2021	Target Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Ket.
		Rp	Rp	Rp	Rp %	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Nilai AKIP - Nilai IKM - Nilai BMD Kondisi Baik	**10.370.361.622**	**10.806.561.622**	**8.546.073.784**	**79,08**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**- Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**50.000.000**	**50.000.000**	**18.902.830**	**37,81**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renstra - Jumlah dokumen Renja - Jumlah dokumen RKA dan RKAP -Jumlah dokumen DPA dan DPPA	25.000.000	25.000.000	8.809.117	35,24	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2021	Target Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Ket.
		Rp	Rp	Rp	Rp %	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan LAPTAH PD yang diselesaikan secara tepat waktu	25.000.000	25.000.000	10.093.713	40,37	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**6.868.332.739**	**7.142.982.739**	**5.320.819.753**	**74,49**	
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gajih dan tunjangan perbulan	6.843.332.739	7.117.982.739	5.309.302.045	74,59	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	25.000.000	25.000.000	11.517.708	46,07	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**40.000.000**	**40.000.000**	**39.600.000**	**99,00**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	40.000.000	39.600.000	99,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**644.000.000**	**621.500.000**	**485.160.953**	**78,06**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	15.000.000	15.000.000	14.940.200	99,60	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.221.842	186.221.842	181.731.000	97,59	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	24.000.000	24.000.000	23.839.750	99,33	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.778.158	23.778.158	23.733.500	99,81	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan	20.000.000	20.000.000	10.045.000	50,23	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Penyediaan Makan Minum dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu/Rapat	25.000.000	25.000.000	6.865.000	27,46	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2021	Target Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Ket.
		Rp	Rp	Rp	Rp %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	350.000.000	327.500.000	224.006.503	68,40	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah**	**2.056.280.000**	**2.208.830.000**	**2.070.877.559**	**93,75**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	7.500.000	7.500.000	2.015.000	26,87	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	112.500.000	112.500.000	45.560.823	40,50	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan BPJS NON PNS	1.936.280.000	2.088.830.000	2.023.301.736	96,86	
	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan					
	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan					
	Jumlah Penyediaan Tenaga NON ASN					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**711.748.883**	**743.248.883**	**610.712.689**	**82,17**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	96.821.850	96.821.850	51.660.305	53,36	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara	64.927.033	64.927.033	20.106.959	30,97	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15.000.000	15.000.000	9.000.000	60,00	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	35.000.000	66.500.000	33.915.000	51,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab	500.000.000	500.000.000	496.030.425	99,21	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2021	Target Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Ket.
		Rp	Rp	Rp	Rp %	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**14.150.876.795**	**15.301.481.714**	**13.816.073.904**	**90,29**	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**627.000.000**	**627.000.000**	**161.126.900**	**25,70**	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	231.000.000	231.000.000	122.351.900	52,97	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	396.000.000	396.000.000	38.775.000	9,79	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**11.568.351.795**	**12.718.956.714**	**12.001.571.457**	**94,36**	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	555.149.789	245.559.226	0	0,00	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	876.501.795	876.501.795	642.815.500	73,34	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan warga negara yang mengikuti kebencanaan dan gladi serta simulasi	363.000.000	463.000.000	418.865.800	90,47	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan yang penanganan pasca bencana	9.010.700.211	10.370.895.693	10.231.501.448	98,66	Huntap 8 rumah, Psikososial pada sekolah dasar 4 (180 murid kali 4 SD)
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Bimtek TRC, SAR, Sekolah Gunung dan sungai Jumlah Desa tangguh bencana	763.000.000	763.000.000	708.388.709	92,84	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.955.525.000**	**1.955.525.000**	**1.653.375.547**	**84,55**	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2021	Target Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Ket.
		Rp	Rp	Rp	Rp %	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	330.525.000	223.635.420	190.008.180	84,96	Capaian Target berdasarkan laporan kejadian bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	350.000.000	350.000.000	207.641.650	59,33	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kebutuhan dasar bagi korban bencana	1.275.000.000	1.381.889.580	1.255.725.717	90,87	Makanan siap saji, Family kit, Alat kebersihan, alat pertukangan, Sandang

Pada Tabel diatas dievaluasi dalam bentuk realisasi anggaran. Selanjutnya, pada **Tabel T-C.29** menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.3
Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021
Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	100	70.98	Nilai	74.00	71.65	9682%	Nilai	70.00	212.63	2.13
						Nilai IKM			Nilai	75.00	81.5	10867%	Nilai	76.00	157.50	#DIV/0!
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase pemenuhan proses perencanaan	100		%	100.00	100%	100%	%	100.00	101.00	101%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renstra - Jumlah dokumen Renja - Jumlah dokumen RKA dan RKAP -Jumlah dokumen DPA dan DPPA	40		Dokumen	6.00	6	100%	Dokumen	2.00	8.00	20%
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan LAPTAH PD yang diselesaikan secara tepat waktu	12		Dokumen	6.00	6	100%	Dokumen	2.00	8.00	67%
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu** **- Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	100	**18.98**	**%**	**100.00**	**100**	**100%**	**%**	**100.00**	**218.98**	**219%**
1	5	1	2.02	1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gajih dan tunjangan perbulan	72	3	Bulan	12.00	12	100%	Bulan	14.00	29.00	40%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	12		Dokumen	2.00	2	100%	Dokumen	2.00	4.00	33%
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**		**%**	**100.00**	**100%**	**1%**	**%**	**100.00**	**101.00**	**101%**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,028		Stell	82.00	80	98%	Stell	80.00	160.00	16%
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	100		**%**	**100.00**	100	**100%**	**%**	**100.00**	**200.00**	**200%**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	76		Jenis	14.00	14	100%	Jenis	15.00	29.00	38%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123		Unit	11.00	11	100%	Unit	8.00	19.00	15%
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	51		Jenis	15.00	15	100%	Jenis	5.00	20.00	39%
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan Barang Cetakan dan Penggandaan	203		Jenis	6.00	6	100%	Jenis	6.00	12.00	6%
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan	64		Jenis	4.00	4	100%	Jenis	4.00	8.00	13%
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Penyediaan Makan Minum dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu/Rapat	21,956		HOK	925.00	457	49%	HOK	500.00	957.00	4%
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,296		HOK	425	400	#VALUE!	HOK	250.00	650	28%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
						- Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana			Orang	50.00	-	0%	Orang	-	0.00	#DIV/0!
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah**	100		**%**	**100.00**	100	**100%**	**%**	**100.00**	**200.00**	**200%**
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibeli	8		Unit	1.00	1	100%	Unit	1.00	2.00	25%
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah**	**100**	**12.80**	**%**	**100.00**	**12.80**	**13%**	**%**	**100.00**	**125.60**	**126%**
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	14,794		Buah	3,250.00	3,260	100%	Buah	3,000.00	6,260.00	42%
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	72		Bulan	12.00	12	100%	Bulan	12.00	24.00	33%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan BPJS NON PNS	783		Orang	715.00	715	100%	Orang	660.00	1,375.00	176%
						Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan	693		OB	48.00	48	100%	OB	48.00	96.00	14%
						Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	48		OB	48.00	48	100%	OB	48.00	96.00	200%
						Jumlah Penyediaan Tenaga NON ASN	1,849	144	OB	660.00	660	100%	OB	660.00	1,464.00	79%
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	100		**%**	**100.00**	100	**100%**	**%**	**100.00**	**200.00**	**200%**
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	767		Kali	245.00	125	51%	unit	14.00	139.00	18%
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara	209		unit	105.00	35	33%	unit	23.00	58.00	28%
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah jenis peralatan			Kali		9	75%	jenis		11.00	4%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
					dan Mesin Lainnya	dan mesin lainnya yang dipelihara	308			12.00				2.00		
1	5	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetaplainnya yang dipelihara	38		Kali	38.00	19	50%	jenis	-	19.00	50%
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab	5		Paket	1.00	1	100%	Paket	1.00	2.00	40%
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	100		**%**	**100.00**	100	**100%**	**%**	**100.00**	**200.00**	**200%**
1	**5**	**3**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Terselenggarakannya pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kab. Bandung**	100		**%**	**70,000**	667569	**954%**	**Orang**	**50,000.00**	**717,569.00**	**717569%**
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemutakhiran KRB	1		Persen	100.00	100	100%	Persen	100.00	200.00	20000%
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Penduduk di KRB yang memperoleh Informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	70,000		Persen	100.00	100	100%	Persen	100.00	200.00	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
1	**5**	**3**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Terselenggarakannya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	100		**%**	**70,000.00**	269512	**385%**	**Orang**	**50,000.00**	**319,512.00**	**319512%**
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan warga negara yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1,081		Persen	100.00	0%	0%	Persen	100.00	100.00	9%
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	70,000		Persen	100.00	100%	1%	Persen	100.00	101.00	0%
						- Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	402		Jenis	-	0	#DIV/0!		-	0.00	0%
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Jumlah Aparatur dan warga negara yang mengikuti	300		Orang	200.00	196	98%	Desa	3.00	199.00	66%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
					Kesiapsiagaan	kebencanaan dan gladi serta simulasi										
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan yang penanganan pasca bencana	2,200		Orang	50,000.00	51066	102%	Orang	300.00	51,366.00	2335%
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-Jumlah Masyarakat yang mengikuti Bimtek TRC, SAR, Sekolah Gunung dan sungai	100		Orang	214.00	214	100%	Orang	100.00	314.00	314%
						-Jumlah Desa tangguh bencana	2		Desa	3.00	3	100%	Desa	-	3.00	150%
1	**5**	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terselenggarakannya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	100		**%**	**217,192.00**	217,192	**100%**	**Orang**	**50,000.00**	**267,192.00**	**267192%**
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan bencana yang ditanggulangi < 24 jam	70,000		Persen	100.00	100	100%	Persen	100.00	200.00	0%
						Jumlah penanganan bencana yang ditanggulangi < 24 jam	2		Kali	-	-	#DIV/0!	Kali	2.00	2.00	100%
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong	70,000		Persen	100.00	100	100%	Persen	100.00	200.00	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
					Bencana Kabupaten/Kota	dan dievakuasi terhadap kejadian bencana										
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kebutuhan dasar bagi korban bencana	49		Jenis	5.00	5	100%	Jenis	6.00	11.00	22%

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat;
c. Belum optimalnya penyusunan dokumen peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung;
d. Kurang terpenuhinya data dukung berkenaan dengan data potensi bencana perwilayah, rekapitulasi kejadian bencana yang disertai kerugian material dan non material;
e. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran hal ini dikarenakan adanya refocusing Crosscutting;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

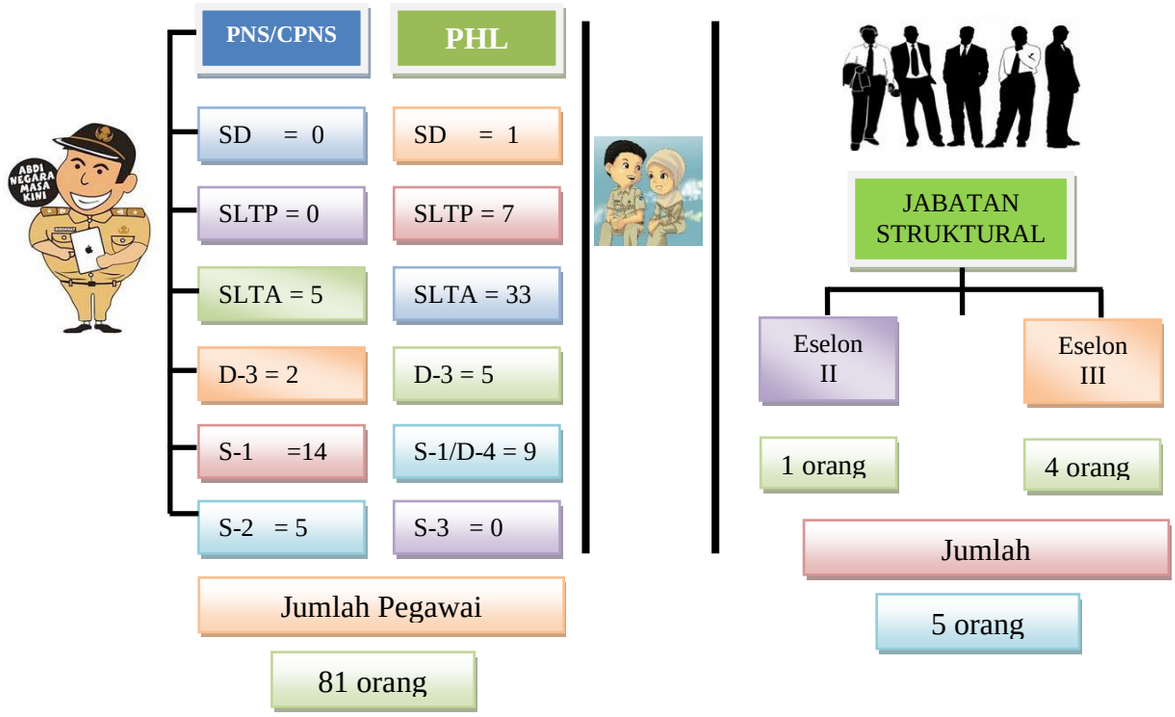
Tabel 2.4
T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022 (Juni)	2023	2024	
1.	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0.5	0.54	0.56	0.58	0.55	N/A	0.56	0.58	
	Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
2.	Nilai IKM		75	76	77	78	81,5	71	78	80	
	Nilai SAKIP		74	70	72	74	71,65	N/A	72	74	
	Persentase BMD Kondisi Baik		100%	75%	80%	90%	89,61 %	N/A	80%	90%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok dan Fungsi BPBD

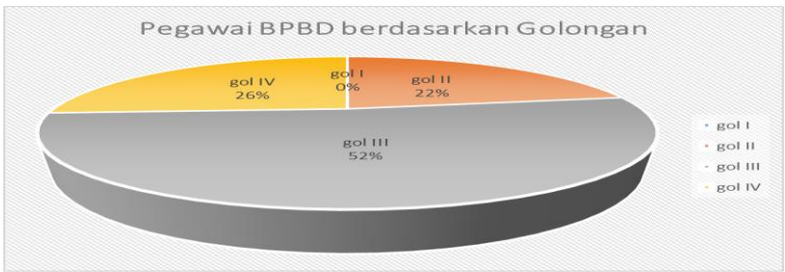
Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Gambar 2.1
PROFIL
DEMOGRAFI PEGAWAI
BPBD TAHUN 2022



Dilihat dari ***Gambar 2.3.1*** Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

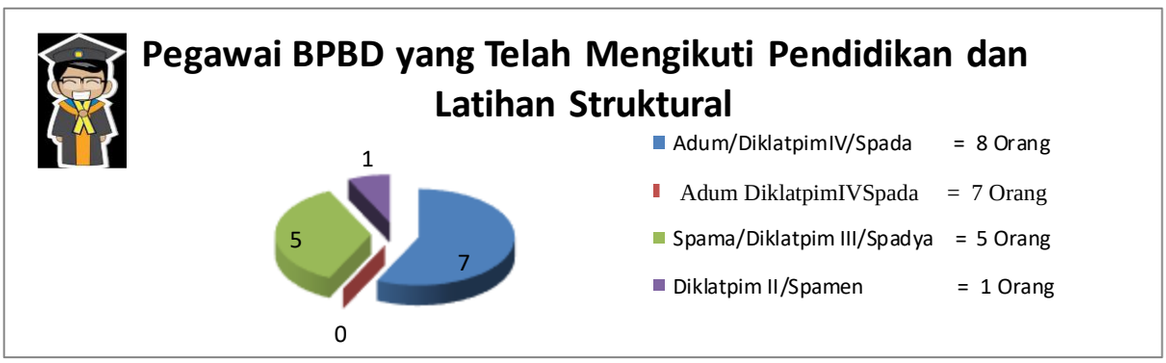
Gambar 2.2
Pegawai BPBD Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2022



Berdasarkan ***Gambar 2.3.2***, pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 22 %, Golongan III sebanyak 52% dan Golongan IV sebanyak 26%, melihat komposisi tersebut, pagawai BPBD banyak ditempati oleh golongan II Dan III, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat, membawahkan
   a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub. Bagian Keuangan
   c. Sub. Bagian Penyusunan Program

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
f. Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
   - Perencana
   - Analis Keuangan Pusat dan Daerah
   - Penata Penanggulangan Bencana

Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung adalah:

TABEL 2.5
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
1. Sumber Daya Manusia	Implementasi rencana kerja BPBD belum optimal	Rasio Jumlah Personil dengan Pelayanan Publik di Bidang Kebencanaan	Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan Aparatur terbatas	kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana
2. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan Pendanaan/Anggaran Sektoral BPBD	Perda. APBD tentang Rasio Pagu Anggaran Kebencanaan sebesar 30 % dari Total APBD	Rancangan Kebutuhan Pagu Anggaran yang proporsional	Regulasi/Kebijakan Pagu Anggaran APBD	Belum optimalnya Pagu Anggaran Sektoral BPBD
3. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No 7 Tahun (standarisasi sarana prasarana pemerintah)	Belum lengkapnya Rescue KIT	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Aksi Daerah	Dokumen Perencanaan Untuk jangka waktu	Pembuatan RAD, PRB dan Rencana Kontijensi masih	Perda/Perbup tentang RAD, PRB dan Rencana	Belum optimalnya kualitas Sistem

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
	(RAD), Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Kontijensi	tertentu	dalam proses	Kontijensi belum terbit	Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan ke seluruh swilayah kecamatan	Dana/Anggaran	Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
6. Pengembangan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya pembentukan Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB	Pencegahan/ Siaga dan Adaptasi	Terbatasnya ketersediaan Anggaran dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB	Belum terbitnya Perda Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana
7. Peningkatan/Pengoptimalan Koordinasi lintas SKPD terkait Penanggulangan Bencana dari Aspek Kewenangan/Tupoksi, Penganggaran, Program dan Kegiatan	Belum Optimatnya Pelaksanaan kualitas Koordinasi Lintas SKPD terkait Penanggulangan Kebencanaan.	Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Kerja	Fungsi Komando /memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persepsi dan Intepretasi SKPD terhadap Penangguala ngan Bencana belum sama dan sejalan.	Belum Optimalnya Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana baik lintas lembaga/intansi/SKPD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
8. Penanganan Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana pada saat Pra, Saat dan Pasca Bencana.	SPM (Standar Pelayanan Minimal) Penanggulangan Kebencanaan	SPM/SOP dalam Proses	Regulasi/Kebijakan SPM/SOP dari Pemerintah Pusat belum terbit	Belum adanya Pedoman/Acuan yang dilandasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
9. Kajian Resiko Becana (KRB)	Belum Optimalnya Kegiatan KRB	Dokumen Kajian	Kewenangan dan Tupoksi	Anggaran dan SDM	Belum adanya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
10. Sistem Penanganan Darurat Bencana	Terbentuknya Pusdalops dan Gis	SDM dan IPTEK	Tupoksi dan SDM	Peningkatan Anggaran untuk pengembngan SDM berupa Diklat/Bintek	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketiga. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang

wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar PD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

1) Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
2) Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
3) Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung:

1) Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai dalam APBD karena keberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

2) Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

3) Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.

4) Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif.

2.4 Review Terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJMP dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD yang baru terbentuk lima tahun membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat -alat evakuasi yang memiliki kualitas bagus dan sebuah manajemen gudang logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara ekternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan BPBD harus melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan Keuangan Daerah (BKD) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) , Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pendidikan (DISDIK), Dinas Kebakaran (DISKAR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), SATPOL PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian (DISTAN), Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (BADAN KESBANGPOL) seluruh kecamatan dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel **T-C.31** berikut.

Tabel 2.6
TABEL T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**X X**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Bandung**	**Nilai AKIP dan IKM**	**72**	**Rp 10,037,103,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Bandung**	**Nilai AKIP dan IKM**	**72**	**Rp 11,627,171,194.00**
X	**X X**	**0 1**	**2. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**100%**	**Rp 70,000,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**100 Persen**	**Rp 73,000,000.00**
X	X X	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 25,000,000.00	X	X X	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp20,000,000.00
X	X X	0 1	2. 02	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00	X	X X	0 1	2. 02	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	Rp30,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
							SKPD										Dokumen RKA-SKPD		
X	X X	0 1	2. 03	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00	X	X X	0 1	2. 03	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp5,000,000.00
X	X X	0 1	2. 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 25,000,000.00	X	X X	0 1	2. 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Rp18,000,000.00
X	**X X**	**0 1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**Rp 6,698,323,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 Persen**	**Rp 8,086,031,194.00**

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja: Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan: Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
							- Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan										**- Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**		
X	X X	0 1	2. 02	0 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	Rp 6,685,323,000.00	X	X X	0 1	2. 02	0 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	Rp 8,076,031,194.00
X	X X	0 1	2. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Rp 13,000,000.00	X	X X	0 1	2. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Rp10,000,000.00
X	**X X**	**0 1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**Rp 50,000,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	100 Persen	Rp50,000,000.00
X	X X	0 1	2. 05	0 7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 50,000,000.00	X	X X	0 1	2. 05	0 7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp50,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**X X**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100%**	**Rp 670,000,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100 Persen**	**Rp 665,000,000.00**
X	X X	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 20,000,000.00	X	X X	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp20,000,000.00
X	X X	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 195,000,000.00	X	X X	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp195,000,000.00
X	X X	0 1	2. 06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp 20,000,000.00	X	X X	0 1	2. 06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp20,000,000.00
X	X X	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	Rp 10,000,000.00	X	X X	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	Rp10,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
						g	Disediakan										Disediakan		
X	X X	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,000,000. 00	X	X X	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp20,000,000.00
X	X X	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 20,000,000. 00	X	X X	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp15,000,000.00
X	X X	0 1	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 35,000,000. 00	X	X X	0 1	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp35,000,000.00
X	X X	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 350,000,00 0.00	X	X X	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp350,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**X X**	**0 1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**Rp 40,000,000. 00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**0 Persen**	**Rp40,000,000.00**
X	X X	0 1	2. 07	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000. 00	X	X X	0 1	2. 07	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp27,900,000.00
X	X X	0 2	2. 08	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000. 00	X	X X	0 2	2. 08	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp1,050,000.00
X	X X	0 1	2. 07	0 5	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp 10,000,000. 00	X	X X	0 1	2. 07	0 5	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp10,000,000.00
X	X X	0 1	2. 07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Bandun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	Rp 10,000,000. 00	X	X X	0 1	2. 07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	Rp1,050,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	g	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
X	**X X**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100%**	**Rp 2,058,780,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100 Persen**	**Rp2,272,140,000.00**
X	X X	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3100 Laporan	Rp 10,000,000.00	X	X X	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3100 Laporan	Rp10,000,000.00
X	X X	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 112,500,000.00	X	X X	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp112,500,000.00
X	X X	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 1,936,280,000.00	X	X X	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 2,149,640,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**X X**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**100%**	**Rp 450,000,000.00**	**X**	**X X**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**100 Persen**	**Rp441,000,000.00**
X	X X	0 1	2. 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Rp 100,000,000.00	X	X X	0 1	2. 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Rp100,000,000.00
X	X X	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Rp 70,000,000.00	X	X X	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Rp70,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja: Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan: Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	XX	00	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Rp 10,000,000.00	X	XX	00	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Rp1,000,000.00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp70,000,000.00
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 50,000,000.00	X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp-
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 200,000,000.00	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp200,000,000.00
					Jumlah Program 1			**100%**	**Rp 10,037,103,000.00**						**Jumlah Program 1**			**100%**	**Rp 11,627,171,194.00**
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**Rp 5,877,241,000.00**	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**Rp 5,677,881,000.00**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan**	**500000 Orang**	**Rp 110,000,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan**	**500000 Orang**	**Rp 110,000,000.00**

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
					Kabupaten/Kota		**informasi rawan bencana**										**informasi rawan bencana**		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	475000 Orang	Rp 100,000,000.00	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	475000 Orang	Rp 100,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**250000 Orang**	**Rp 2,933,000,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**250000 Orang**	**Rp 2,733,640,000.00**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 700,000,000.00	1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 500,640,000.00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120 Orang	Rp 300,000,000.00	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120 Orang	Rp 300,000,000.00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1 Dokumen	Rp 400,000,000.00	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	1 Dokumen	Rp 400,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
					Bencana Kabupaten/Kota		Terhadap Bencana Kabupaten/Kota										Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 Unit	Rp 300,000,000.00	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 Unit	Rp 300,000,000.00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan	Kabupaten Bandung	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegah	- 1 Kawasan - 5 Kali	Rp 400,000,000.00	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencega	- 1 Kawasan 5 Kali	Rp 400,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
					dan Kesiapsiagaan		an dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah								han dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	Rp 463,000,000.00	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	Rp 463,000,000.00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00	1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi	200 Orang	Rp 150,000,000.00	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti	200 Orang	Rp 150,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
							Kesiapsiagaan										Gladi Kesiapsiagaan		
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**170000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**170000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	Rp 10,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Rp 350,000,000.00	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Rp 350,000,000.00
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100000 Orang	Rp 200,000,000.00	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100000 Orang	Rp 200,000,000.00
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50000 Orang	Rp 1,075,000,000.00	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50000 Orang	Rp 1,075,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**100%**	**Rp 1,179,241,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan**	**100%**	**Rp 1,179,241,000.00**

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
																	kebencanaan		
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi	Kabupaten Bandung	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Rancangan Renja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
					Kebencanaan														
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 Dokumen	Rp 1,129,241,000.00	1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 Dokumen	Rp 1,129,241,000.00
					Jumlah Program 2				**Rp 5,877,241,000.00**						**Jumlah Program 2**				**Rp 5,677,881,000.00**
					Jumlah Program 1+2				**Rp 15,914,344,000.00**						**Jumlah Program 1+2**				**Rp 17,305,052,194.00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung berasaskan lima prinsip yaitu perencanaan **politik**, perencanaan **teknokratik**, perencanaan **partisipatif**, perencanaan ***top down***, dan perencanaan ***bottom up***. Musrenbang Kabupaten Bandung tahun 2022 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan ***top down*** dan perencanaan ***bottom up*** yang dimulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Namun demikian sejak tahun anggaran 2023 pada kegiatan musrenbang kewilayahan (usulan ***bottom up***), BPBD Kabupaten Bandung tidak termasuk OPD yang mengusung dan mengakomodir usulan musrenbang kewilayahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD kabupaten Bandung Tahun 2023.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional pada dokumen RPJMN salah satunya Prioritas Ke-6 yaitu tentang "**Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**" diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2023 memuat 9 prioritas dimana prioritas nomor lima berbunyi "**Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Mendukung PembangunanBerkelanjutan dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim**", ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Prioritas ke-6 yaitu "**Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**". Sedangkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung masuk dalam misi ketiga yaitu "Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan". Untuk mendukung pencapaian misi ketiga Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran BPBD, disusunlah empat strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur BPBD;
2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat;
3. Memberdayakan seluruh sumber daya kebencanaan di Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan *good governance*;
4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2023

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.



BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu :

"*Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)*".

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-3 (Ketiga) yaitu:

"*Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan*".

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa

bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi (***Core business***) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2023 dalam rangka mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD (Misi Ketiga), dalam program dan kegiatan di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

SASARAN

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi Bupati Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai OPD pendukung dalam Misi 3 ***"*Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan*".*** Seiring dengan berjalannya program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 Untuk lebih mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, di Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat dari ***tabel T-C.33*** berikut.

Tabel 3.1

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bandung

Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X	**XX**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**	**Kabupaten Bandung**	77 72	**Rp 11,627,171,194.00**	**APBD**		**78 74**	**Rp 10,037,103,000.00**
X	**XX**	**0 1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Kabupaten Bandung**	100 Persen	**Rp 73,000,000.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 70,000,000.00**
X	XX	0 1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	3 Dokumen	Rp 20,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp 25,000,000.00
X	XX	0 1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 30,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp 10,000,000.00
X	XX	0 1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp 10,000,000.00
X	XX	0 1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	2 dokumen	Rp 18,000,000.00	APBD		2 dokumen	Rp 25,000,000.00
X	**XX**	**0 1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Kabupaten Bandung**	100 Persen	**Rp 8,086,031,194.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 6,698,323,000.00**
X	XX	0 1	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	25 Orang/ Bulan	Rp 8,076,031,194.00	APBD		27 Orang/ Bulan	Rp 6,685,323,000.00
X	XX	0 1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	3 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD		3 Laporan	Rp 13,000,000.00
X	**XX**	**0 1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Kabupaten Bandung**	100 Persen	**Rp 50,000,000.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 50,000,000.00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bandung	100 Paket	Rp 50,000,000.00	APBD		100 Paket	Rp 50,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 665,000,000.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 670,000,000.00**
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	15 Paket	Rp 20,000,000.00	APBD		15 Paket	Rp 195,000,000.00
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	8 Paket	Rp 195,000,000.00	APBD		8 Paket	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Bandung	5 Paket	Rp 20,000,000.00	APBD		5 Paket	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	1 Paket	Rp 10,000,000.00	APBD		1 Paket	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	6 Paket	Rp 20,000,000.00	APBD		6 Paket	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 15,000,000.00	APBD		4 Dokumen	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 35,000,000.00
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 350,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 350,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**0 Persen**	**Rp 40,000,000.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 40,000,000.00**
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 27,900,000.00	APBD		0 Unit	Rp 10,000,000.00
X	XX	02	2.08	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 1,050,000.00	APBD		0 Unit	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Unit	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 1,050,000.00	APBD		0 Unit	Rp 10,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 2,272,140,000.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 2,058,780,000.00**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	3100 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 112,500,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 112,500,000.00
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	4 Laporan	Rp 2,149,640,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 1,936,280,000.00
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 441,000,000.00**	**APBD**		**100 Persen**	**Rp 450,000,000.00**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bandung	14 Unit	Rp 100,000,000.00	APBD		14 Unit	Rp 100,000,000.00
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bandung	23 Unit	Rp 70,000,000.00	APBD		23 Unit	Rp 70,000,000.00
X	XX	00	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 1,000,000.00			1 Unit	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp 70,000,000.00	APBD		2 Unit	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	5 Unit	Rp -	APBD		5 Unit	Rp 50,000,000.00
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 200,000,000.00	APBD		1 Unit	Rp 200,000,000.00
					Jumlah Program 1				**Rp 11,627,171,194.00**	APBD			**Rp 10,037,103,000.00**
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 5,677,881,000.00**	**APBD**		**100%**	**Rp 5,877,241,000.00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Kabupaten Bandung**	**500000 Orang**	**Rp 110,000,000.00**	**APBD**		**750000 Orang**	**Rp 410,000,000.00**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kabupaten Bandung	475000 Orang	Rp 100,000,000.00	APBD		750000 Orang	Rp 400,000,000.00
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**250000 Orang**	**Rp 2,733,640,000.00**	**APBD**		**700000 Orang**	**Rp 2,643,000,000.00**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 500,640,000.00	APBD		0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kabupaten Bandung	120 Orang	Rp 300,000,000.00	APBD		120 Orang	Rp 300,000,000.00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 400,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 700,000,000.00
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kabupaten Bandung	3 Unit	Rp 300,000,000.00	APBD		3 Unit	Rp 300,000,000.00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	Rp 10,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	Kabupaten Bandung	- 1 Kawasan - 1 Kali	Rp 400,000,000.00	APBD		- 1 Kawasan - 1 Kali	Rp 400,000,000.00
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kabupaten Bandung	150 Orang	Rp 463,000,000.00	APBD		150 Orang	Rp 463,000,000.00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 200,000,000.00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	200 Orang	Rp 150,000,000.00	APBD		200 Orang	Rp 250,000,000.00
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bandung	50 Keluarga	Rp -	APBD		0 Keluarga	Rp -
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**170000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**	**APBD**		**250000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Laporan	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Kabupaten Bandung	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350,000,000.00	APBD		- 1 Dokumen - 100%	Rp 350,000,000.00
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kabupaten Bandung	100000 Orang	Rp 200,000,000.00	APBD		100000 Orang	Rp 200,000,000.00
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	Kabupaten Bandung	50000 Orang	Rp 1,075,000,000.00	APBD		100000 Orang	Rp 1,075,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Laporan	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu - Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Kabupaten Bandung	- 0 Dokumen - 0%	Rp 10,000,000.00	APBD		- 0 Dokumen - 0%	Rp 10,000,000.00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 1,179,241,000.00**	**APBD**		**100%**	**Rp 1,169,241,000.00**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD		0 Laporan	10,000,000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 1,129,241,000.00	APBD		4 Dokumen	Rp 1,119,241,000.00
					Jumlah Program 2				**Rp 5,677,881,000.00**				**Rp 5,877,241,000.00**
					Jumlah Program 1+2				**Rp 17,305,052,194.00**				**Rp 15,914,344,000.00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka BPBD perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD BPBD dalam penyusunan rencana kerja

Prioritas pembangunan PD BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penaggulangan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera.

Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana
2. Optimalisasi Pagu Anggaran Sektoral BPBD yang rasional dan proporsional
3. Peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Peningkatan kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana
6. Kemandiirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya pencegahan/ kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana
7. Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas lembaga/intansi/PD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
8. Terbitnya regulasi/kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPM/SOP siklus penanggulangan kebencanaan (pra, saat dan pasca bencana).
9. Terdapatnya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan

menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta

10. Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.

Prioritas Sebagaimana diatas dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Serta dalam rangka peningkatan Standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dalam rangka menunjang program/kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaanya harus ditunjang oleh anggaran program operasional dengan melakukan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

   Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

   1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
   2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;*
   3) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;*
   4) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.*

2. ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN;*
2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.*

3. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.*

4. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;*
2) *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;*
3) *Penyediaan peralatan rumah tangga;*
4) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*
5) *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;;*
6) *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
7) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*
8) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

5. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
2) *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
3) *Pengadaan Mebel;*
4) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

5) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*

6) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
7) *Penyediaan Jasa Pelayanan.*

7. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
2) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
3) *Pemeliharaan Mebel;*
4) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
5) *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;*
6) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

8. *Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;*
2) *Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).*

9. *Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
2) *Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota*;
3) *Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;*
4) *Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;*
5) *Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;*
6) *Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;*

7) *Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;*
8) *Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;*
9) *Penyusunan Rencana Kontijensi;*
10) *Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;*
11) *Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.*

10. ***Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;*
2) *Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;*
3) *Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;*
4) *Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;*
5) *Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;*
6) *Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.*

11. ***Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
2) *Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;*
3) *Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
4) *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;*
5) *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;*
6) *Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.*

Penjelasan rencana kerja dan pendanaan BPBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan pada **Tabel 4.1**:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2023
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
A.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	**X**	**X X**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**	**Kabupaten Bandung**	77 72	**Rp 11,627,171,194.00**	**APBD**	
A.1		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 73,000,000.00**	**APBD**	
A.1.1		X	X X	0 1	2.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	3 Dokumen	Rp 20,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
A.1.2		X	X X	0 1	2.01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 30,000,000.00	APBD	
A.1.3		X	X X	0 1	2.01	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	APBD	
A.1.4		X	X X	0 1	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	2 dokumen	Rp 18,000,000.00	APBD	
A.2		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 8,086,031,194.00**	**APBD**	
A.2.1		X	X X	0 1	2.02	0 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	25 Orang/ Bulan	Rp 8,076,031,194.00	APBD	
A.2.2		X	X X	0 1	2.02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	3 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
A.3		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 50,000,000.00**	**APBD**	
A.3.1		X	X X	0 1	2.05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bandung	100 Paket	Rp 50,000,000.00	APBD	
A.4		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 665,000,000.00**	**APBD**	
A.4.1		X	X X	0 1	2.06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	15 Paket	Rp 20,000,000.00	APBD	
A.4.2		X	X X	0 1	2.06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	8 Paket	Rp 195,000,000.00	APBD	
A.4.3		X	X X	0 1	2.06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Bandung	5 Paket	Rp 20,000,000.00	APBD	
A.4.4		X	X X	0 1	2.06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	1 Paket	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.4.5		X	X X	0 1	2.06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	6 Paket	Rp 20,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
A.4.6		X	X X	0 1	2.06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 15,000,000.00	APBD	
A.4.7		X	X X	0 1	2.06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 35,000,000.00	APBD	
A.4.8		X	X X	0 1	2.06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 350,000,000.00	APBD	
A.5		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**0 Persen**	**Rp 40,000,000.00**	**APBD**	
A.5.1		X	X X	0 1	2.07	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 27,900,000.00	APBD	
A.5.2		X	X X	0 2	2.08	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 1,050,000.00	APBD	
A.5.3		X	X X	0 1	2.07	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.5.4		X	X X	0 1	2.07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 1,050,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
A.6		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 2,272,140,000.00**	**APBD**	
A.6.1		X	X X	0 1	2.08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	3100 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD	
A.6.2		X	X X	0 1	2.08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 112,500,000.00	APBD	
A.6.3		X	X X	0 1	2.08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	4 Laporan	Rp 2,149,640,000.00	APBD	
A.7		**X**	**X X**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**Kabupaten Bandung**	**100 Persen**	**Rp 441,000,000.00**	**APBD**	
A.7.1		X	X X	0 1	2.09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bandung	14 Unit	Rp 100,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
A.7.2		X	X X	0 1	2.09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bandung	23 Unit	Rp 70,000,000.00	APBD	
A.7.3		X	X X	0 0	2.09	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 1,000,000.00		
A.7.4		X	X X	0 1	2.09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp 70,000,000.00	APBD	
A.7.5		X	X X	0 1	2.09	0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	5 Unit	Rp -	APBD	
A.7.6		X	X X	0 1	2.09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 200,000,000.00	APBD	
							Jumlah Program 1				**Rp 11,627,171,194.00**	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
B.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 5,677,881,000.00**	**APBD**	
B.1		**1**	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Kabupaten Bandung**	**500000 Orang**	**Rp 110,000,000.00**	**APBD**	
B.1.1		1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.1.2		1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kabupaten Bandung	475000 Orang	Rp 100,000,000.00	APBD	
B.2		**1**	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**250000 Orang**	**Rp 2,733,640,000.00**	**APBD**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
B.2.1		1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 500,640,000.00	APBD	
B.2.2		1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kabupaten Bandung	120 Orang	Rp 300,000,000.00	APBD	
B.2.3		1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 400,000,000.00	APBD	
B.2.4		1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kabupaten Bandung	3 Unit	Rp 300,000,000.00	APBD	
B.2.5		1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
B.2.6		1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	Kabupaten Bandung	- 1 Kawasan - 1 Kali	Rp 400,000,000.00	APBD	
B.2.7		1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						
B.2.8		1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kabupaten Bandung	150 Orang	Rp 463,000,000.00	APBD	
B.2.9		1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00	APBD	
B.2.10		1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	200 Orang	Rp 150,000,000.00	APBD	
B.2.11		1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
B.2.12		1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bandung	50 Keluarga	Rp -	APBD	
B.3		**1**	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**170000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**	**APBD**	
B.3.1		1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.3.2		1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Kabupaten Bandung	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350,000,000.00	APBD	
B.3.3		1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kabupaten Bandung	100000 Orang	Rp 200,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
B.3.4		1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bandung	50000 Orang	Rp 1,075,000,000.00	APBD	
B.3.5		1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.3.6		1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu - Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Kabupaten Bandung	- 0 Dokumen - 0%	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.4		**1**	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**Kabupaten Bandung**	**100%**	**Rp 1,179,241,000.00**	**APBD**	
B.4.1		1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi				
B.4.2		1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.4.3		1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.4.4		1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.4.5		1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	APBD	
B.4.6		1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 1,129,241,000.00	APBD	
							Jumlah Program 2				**Rp 5,677,881,000.00**		
							Jumlah Program 1+2				**Rp 17,305,052,194.00**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung merupakan rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan dalam aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung maupun OPD yang membidangi urusan lain.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (***stakeholders***) dalam menciptakan ***Good Governance*** sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bandung selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bandung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2023. Adapun fungsi dari Renja tahun anggaran 2023

ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja pada tahun anggaran 2021 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2023 kami susun sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Soreang, 29 Juli 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Dr. OKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19670914 199501 1 001

Disahkan Oleh:
Bupati Bandung,

M. DADANG SUPRIATNA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax (022) 85872591 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, *E-mail : bpbdkabbandung@gmail.com*
http://bpbd-kabbandung.blogspot.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.058/BPBD/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumberdaya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya kebencanaan ;

b. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel rencana kerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan RENJA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023, yang terdiri dari ketua tim, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung bertugas menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 28 Januari 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung



Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19670914 199501 1 001

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung
Nomor : 050/Kep.058/BPBD/2022
Tanggal : 28 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs. Uka Suska Puji Utama, M.Si.	Kepala Pelaksana BPBD	Pembina
2.	Hendra Hidayat, S.Sos., M.Si.	- Sekretaris BPBD - Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua Tim
3.	Dadan, S.H.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Diki Sudrajat, ST., M.Si.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5.	Ecep Kusnadi, S.AP.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
6.	Ade Yeni Noberti, S.Sos., M.Si.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
7.	Asep Mista, S.ST.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
8.	Cuncun Andraeni H., S.Pd.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
9.	Asep Mahmud, A.Md.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
10.	Dewi Sri Purwanti, ST.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
11.	Gilang Fajar Ramadhan, S.kom	PHL	Operator
12.	Rully Roidhan Auditama, S.M.	PHL	Operator

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 28 Januari 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung



Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19670914 199501 1 001

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√	BPBD tidak melaksanakan Kegiatan MUSRENBANG sementara untuk Kegiatan berdasarkan Top Down dan Pokok Pikiran	
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.	√	√		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	BPBD tidak melaksanakan Kegiatan MUSRENBANG sementara untuk Kegiatan berdasarkan Top Down dan Pokok Pikiran	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	√			

Soreang, Juli 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. [illegible] JOSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 19670914 199501 1 001